

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Radar Semarang | Republika | Kompas | Media Online |

Wilayah: Kabupaten Rembang

Halaman 10

Penerima PKH Mundur di Rembang Terbanyak di Jateng

Satgas Polisi dan Desa Terlibat Aktif

REMBANG - Ribuan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri lantaran dianggap sudah mampu secara ekonomi. Atas rekor tersebut, Kabupaten Rembang bahkan mendapatkan penghargaan peringkat I dari

Kementerian Sosial sebagai daerah dengan jumlah PKH mundur tertinggi se- Jawa Tengah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, Sri Wahyuni mengatakan, hingga bulan Juni, sebanyak 1.701 peserta PKH telah mundur. Hingga saat ini, masih tersisa 34.313 keluarga penerima manfaat.

Keluarga yang bisa menerima

PKH, kata dia, harus memenuhi syarat komponen pendidikan, kesehatan, lanjut usia dan penyandang disabilitas akut.

"Komponen pendidikan, seperti di dalam keluarga itu ada anak sekolah SD sampai SMA. Kemudian yang komponen kesehatan ada ibu hamil, ibu menyusui atau ada anak usia 0 - 6 tahun. Yang lanjut usia dan penyandang disabilitas diatur lebih rinci lagi.

Tapi kuncinya, harus memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin," ungkapnya kemarin.

Dia mengakui ditemukan keluarga mampu, tapi sempat menerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang menurutnya sebab kesalahan data yang berasal dari Kementerian Sosial.

"Namun bukan data terbaru. Sehingga memungkinkan ada perubahan kondisi sebuah keluarga.

Saat ini proses validasi pembaruan data terus berlangsung, dinamakan Basis Data Terpadu (BDT)," katanya.

Namun jika ada warga miskin memenuhi syarat menerima PKH ternyata belum tercantum, maka pihak desa bisa mengusulkan ke dalam BDT. "Ini proses di desa masih terus bergerak dan berproses. Kan ada orang miskin baru atau sebaliknya dulu miskin sekarang sudah mampu. Kalau

seperti itu, ya harus mengundurkan diri," imbuhnya.

Untuk memastikan bantuan PKH tepat sasaran di tengah masyarakat, pihak Dinsos juga melibatkan Satuan Tugas Khusus Pengawasan Bantaun Sosial dari kepolisian yang terus bergerak ke desa-desa. Peran pemerintah desa dinilai juga cukup membantu aktif menyaring mana penerima yang tepat dan salah sasaran. **(sov/lis)**